



Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan  
<http://ejournal.upg45ntt.ac.id/index.php/ciencias/index>

## Sejarah Terbentuknya Kefetoran Bani-Bani di Timor Tahun 1936

Moses Kollo<sup>a</sup>, Diana Rohi<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Kupang, Indonesia, [moseskollo22@gmail.com](mailto:moseskollo22@gmail.com)

### Info Artikel

#### Sejarah Artikel:

Diterima: 11 Desember 2021

Direvisi: 05 Januari 2022

Disetujui: 12 Januari 2022

#### Keywords:

History, Kefetoran Bani-Bani,  
Timor

### Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Sejarah Terbentuknya Kefetoran Bani-Bani di Timor Tahun 1936. Lokasi penelitian ini adalah bekas wilayah Kefetoran Bani-Bani yang dipusatkan di Desa Tunbesi sekarang menjadi wilayah Kecamatan Io Kufeu di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi dan telaah pustaka yang berdasarkan dua tahap penelitian sejarah yakni heuristik dan verifikasi atau kritik sumber. Kemudian data penelitian dapat dianalisis menggunakan teknik ketiga yakni interpretasi. Sedangkan hasil penelitian dapat ditulis menggunakan teknik historiografi yang merupakan teknik keempat atau teknik terakhir dalam penelitian sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa factor yang meatarblkangi lahirnya Kefetoran Bani-Bani di Timor yakni (1) Terbentuknya kesatuan masyarakat adat yang luas yang menghendaki adanya seorang pemimpin untuk mengatur dan menciptakan perdamaian dan keseimbangan sosial; (2) Masuk dan berkembangnya pemerintahan Belanda yang ingin mempengaruhi para elit lokal dengan masyarakat untuk menerima dan melaksanakan pemerintahan belanda. Kuatnya hubungan belanda dengan para elit local tertentu untuk memperlancar kepentingan belanda, para usif diangkat menjadi raja; (3) Jumlah keturunan dari masyarakat Bani-bani yang makin lama makin bertambah untuk mengakomodir berbagai kepentingan termasuk pemberian peran maka wilayah kerajaan perlu dibagi menjadi wilayah-wilayah kecil yang kemudian dikenal dengan sebutan kefetoran; (4) Aspek pendekatan pelayanan publik pada zaman tersebut dapat memungkinkan sebab dengan melihat luasnya wilayah kerajaan maka diperlukan para pembantu raja yaitu fetor yang cakap dan bertanggung jawab untuk mengatur wilayah dan masyarakat.

### Abstract

*The purpose of this study is to find out the History of the Establishment of the Bani-Bani Kefetoran in Timor in 1936. The location of this research is a former Bani-Bani Kefetoran area centered in Tunbesi Village is now an area of Io Kufeu Subdistrict in Malacca Regency of East Nusa Tenggara Province. The data sources used in this study are primary data sources and secondary data sources. Research data uses interview techniques, observations and literature studies based on two stages of historical research, namely heuristics and verification or criticism of sources. Then the research data can be analyzed using a third technique, namely interpretation. While the results of the study can be written using historiographical techniques which are the fourth or last technique in historical research. The results showed that there are several factors behind the birth of the Bani-Bani Kefetoran in Timor, namely (1) The establishment of a broad unity of indigenous peoples who want a leader to organize and create peace and social balance; (2) Entry and development*

*of Dutch government that wants to influence the local elite with the community to accept and implement dutch government. Strong dutch relations with certain local elites to facilitate dutch interests, the usif was appointed king; (3) The number of descendants of the Bani-bani community is increasing to accommodate various interests including the granting of roles so that the kingdom's territory needs to be divided into small areas that later became known as kefetoran; (4) Aspects of the public service approach at that time can be possible because by looking at the vastness of the kingdom it is necessary for the king's servants, namely fetors who are capable and responsible for regulating the territory and society.*

✉ Alamat korespondensi:  
Kampus FKIP, Jl. Perintis Kemerdekaan III/40, Kota Kupang  
E-mail: [fkp.j3p@gmail.com](mailto:fkp.j3p@gmail.com)

p-ISSN: 2621-3087  
e-ISSN: 2621-5721

## PENDAHULUAN

Kerajaan di pulau Timor selain diperintah oleh raja dibantu oleh fetor yang berperan sebagai tangan kanan raja atau wakil raja di wilayah kefetoran. Sebagai tangan kanan raja, fetor berperan aktif dalam mengarahkan rakyatnya melaksanakan berbagai kegiatan kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk memudahkan itu koordinasi harus menjaga keamanan kerajaan.

Sebagai tangan kanan raja, maka raja dianggap sebagai kuasa bumi yang diberi hak dan wewenang untuk melaksanakan pemerintahan yang paling penting adalah menjaga keutuhan wilayah. Rakyat yang mendiami wilayah tersebut disebut *toh ana* (rakyat biasa). Kekuasaan fetor ditaati oleh rakyat di wilayahnya.

Sistem politik kerajaan sendiri sering disebut patrimonial atau *monarchy*. Dalam hal ini raja adalah penguasa dan pengayom sama halnya bapak dalam keluarga. Sebagian besar suku dalam kabupaten Belu umumnya menganut genealogis teritorial. Mereka percaya bahwa seluruh warga suku sebenarnya merupakan suku asal keturunan yang memiliki budaya, bahasa dan wilayah adat tertentu (Widiyatmika, 2007:32)

Pengalihan wilayah adat ini menjadi wewenang pemuka adat mulai dari raja, fetor dan temukung. Berawal dari sistem politik Belanda yang ingin menguasai Timor sejak tahun 1657 karena komditi cendana yang sangat terkenal di Eropa. Dimana Belanda menggunakan strategi merangkul tokoh adat, intervensi didalam struktur adat, dan penerapan aturan baru mengenai aturan pemerintahan desa. Adat swapraja yang yang

dibentuk sesuai dengan kesatuan politik asli, namun ada juga wilayah-wilayah kerajaan kecil yang digabungkan dan ini tidak sama tergantung pada dinamika penunduk kerajaan-kerajaan tersebut.

Sebuah kerajaan disebut swapraja yang dipimpin oleh seorang raja dan membawahi sejumlah distrik yang disebut dengan kefetoran. Dibawah kefetoran ada ketemukungan dan dibawah ketemukungan ada juga sejumlah kampung (*Io'o*). Salah seseorang yang pernah menjabat sebagai fetor Bani-Bani yaitu Hendrikus Kun pada tahun 1936-1944.

Kefetoran adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya yang teratur dibawah kekuasaan seorang kepala kampung atau kepala suku. Kefetoran Bani-bani memiliki peran sebagai pembantu raja yang memiliki wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan itu dikenal dengan ketemukungan.

Wilayah ketemukungan yang dipakai seorang temukung dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di wilayah kefetoran harus melaporkan hasil kegiatan kepada fetor. Hal ini berarti wilayah ketemukungan sangat besar yang berarti dalam menata desa-desa gaya baru setelah tahun 1962, sedangkan wilayah kefetoran berubah menjadi kecamatan. Demikian kerajaan berubah menjadi kabupaten yang kini dikenal dengan kabupaten Malaka. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah "Faktor apakah yang melatarbelakangi terbentuknya Kefetoran Bani-Bani di Timor Tahun 1936".

## KAJIAN PUSTAKA

### Sejarah

Sejarah adalah cerita, gambaran pada masa lampau tentang kehidupan umat manusia dan sekitarnya sebagai suatu masalah dalam kehidupan sosial yang disusun secara ilmiah yang didalamnya meliputi urutan-urutan waktu fakta-fakta pada masa tersebut dengan sejumlah tafsiran atau penjelasan yang memberi gambaran tentang apa yang telah berlalu (Gazalba, 1981: 13). Pendapat ini diperkuat oleh Tamburaka (2002:4) yang menyatakan sejarah merupakan gambaran mengenai peristiwa-peristiwa dimasa lampau, tetapi peristiwa-peristiwa dimaksud dianalisa dengan meneliti sebab akibat, kemudian dirangkum kembali kemudian dapat diperoleh pengertian dalam bentuk sistesis yang dapat memberikan penjelasan mengenai aspek-aspek: 1) bagaimana deskripsi peristiwanya, 2) mengapa peristiwa ini terjadi dan 3) kemana peristiwa itu akan terjadi selanjutnya.

Tamburaka (1999:13) mengemukakan dua dalil tentang sejarah yaitu: “sejarah mempunyai arti yang cocok untuk mempelajari alam pikiran dan pengalaman-pengalaman manusia” “dan sejarah bersifat unik, langsung dan dekat”.

Abdulgani (1963:174) menyatakan bahwa sejarah ialah salah satu cabang ilmu yang meneliti dan meyelidiki secara sintematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan dimasa lampau, beserta kejadian-kejadiannya, dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitian dan penyelidikan itu, untuk akhirnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penelitian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses masa depan. Sejarah dalam pengertian itu mengandung tiga dimensi waktu yaitu masa lampau, (*past*), sekarang (*present*), dan akan datang (*future*).

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa sejarah ilmu yang mempelajari peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau, serta membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan umat manusia. Kejadian atau peristiwa ini meninggalkan bukti yang dapat dikumpulkan untuk diteliti oleh generasi sekarang ini.

Kejadian atau peristiwa ini terjadi dalam ruang dan waktu.

### Kefetoran

Menurut Parera (1994: 25) fetor berasal dari perkataan yaitu *feitor*. Dalam kamus Portugis- Inggris yang sudah usang (sekitar tahun 1990), *feitor* diterjemahkan dengan *fector*, *manager*, *steward*, *farmer*, *husbandman*, *Doemaker*, *performer*.

Kefetoran adalah suatu wilayah dengan jumlah yang teratur dibawah kekuasaan seorang kepala kampung atau kepala suku. Kefetoran bani-bani memiliki peran sebagai kepala kampong yang mempunyai wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan tersebut dikenal dengan sebutan Tamukung. Wouden Van (1996: 98), mengatakan bahwa terdapat tiga fungsionaris penting dalam sebuah kerajaan, yaitu raja utama, tangan kanan (fetor) dan tangan kiri (hulubalang). Sedangkan menurut Widiyatmika (2007: 76), fetor adalah pejabat yang berkuasa disamping raja.

Sedangkan menurut Parera (1994:76), kata fetor berasal dari bahasa portugis yaitu “Fetor” yang dikelompokan pada bangsawan tingkat pertama dan ditulis fetor sedangkan beberapa tempat, seperti di Belu, digunakan istilah Kapitan kalau diflores dan di Sikka dikenal dengan Alvieris dan Kabu, Alvieris sebagai temukung besar dan kabu sebagai pesuruh kampug sedangkan fetor diterjemahkan dengan Victory berasal dari zaman portugis (Parera, 1994: 215).

### Pemerintahan

Bolis (1992:80) menyatakan bahwa daerah, bangsa, dan baik pemerintahan sebagai unsure pembentuk suatu Negara apabila dirawat baik semakain besar dan jayalah kerajaan atau Negara itu akan lenyap. Sitanggas (1996:23) menyatakan pemerintahan adalah suatu system dari gerakan semua fungsi yang ada di suatu masyarakat atau Negara yang mempunyai wilayah tertentu dugunakan sebagai alat kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan dengan meliputi bidang-bidang kejasmanian dan kerohanian.

Doko (1981:2) menyatakan bahwa pemerintahan pada masa lalu dapat dijalani atas dasar adat dimana seorang pemimpin

(raja) adalah penguasa tunggal dalam wilayahnya. Kotten (1972:2) menyatakan pemerintahan dalam cara perbuatan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan termasuk kewajiban, tugas, dan tanggung jawab dari orang atau badan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara atau daerah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan organisasi formal pada suatu daerah dalam suatu Negara, yang didalamnya terdapat pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintah yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka. Adapun alasan memilih lokasi ini karena lokasi ini merupakan bekas Kefetoran Bani-Bani sehingga diyakini dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh data penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian historis dimana dalam proses pengumpulan data hingga penulisan hasil penelitian dilakukan secara historis. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian sejarah adalah sumber asli yang menyaksikan atau sumber yang ada bersamaan dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Karena itu, sumber data primer dalam penelitian ini adalah catatan Feter Hendrikus atau dokumen sejenis, pusat kefetoran (istana fetor), dan peninggalan lainnya. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang dapat member informasi terkait Kefetoran Bani-Bani walaupun ia tidak turut merasakan kepemimpinan Feter Hendrikus di Kefetoran Io Kufeu Timor. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah observasi, wawancara dan telaah pustaka yang berlandaskan heuristik, kritik sumber dan interpretasi. Sedangkan hasil penelitian ditulis menggunakan teknik historiografi yang merupakan tahap terakhir dalam langkah penelitian sejarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang Terbentuknya Kefetoran Bani-Bani Di Timor Tahun 1936

Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa kolonial Belanda merupakan suatu keresidenan yang dinamakan Keresidenan Timor dan daerah takhluknya (De Residen Van Timor En Onder Horigheden). Diatur dalam *Indische Staatblad* 1916, No. 372 (Sejarah daerah NTT 1980: 93)

Wilayah hukum Keresidenan Timor terbagi atas tiga afdeling yaitu afdeling Flores, afdeling Timor, dan afdeling Sumba yang masing-masing diperintah oleh seorang asisten residen. Setiap afdeling terbagi atas wilayah bagi yang disebut onder afdeling yang dikepalai seorang Pamong Praja yang bergelar kontroleur, dan didalam setiap onder afdeling terdapat swapraja-swapraja. Setiap swapraja terbagi lagi atas beberapa wilayah bagian berdasarkan bentuk kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai ciri khas berdasarkan suatu lingkungan persatuan adat, yang sebutannya berbeda-beda disetiap daerah diwilayah Nusa Tenggara Timur (Memori Gubernur NTT, Buku 1958-1972: 79).

Didalam badan persekutuan pemerintah adat yang dipimpin oleh tua-tua suku (kepala-kepala suku) maka lama kelamaan mulai berlaku sistem norma dan tatanan kemasyarakatan adat yang ternyata luas pengaruhnya hingga saat ini. Demikian pula adanya struktur adat dengan pembagian tugas kepada mereka yang dipilih dan ditetapkan sebagai kepala suku maupun anggota suku.

Dalam kehidupan suku ada juga aturan (berupa hukum adat) yang berlaku, diakui dan tetap bertahan relative cukup lama sampai masuknya pengaruh budaya dari pihak luar. Berbagai inovasi juga harus diterima oleh semua anggota sebab telah ada arus informasi komunikasi sejalan dengan perkembangan zaman. Kehadiran suatu wilayah kefetoran pada zaman lampau erat hubungan dengan tuntutan zaman. Pergeseran-pergeseran yang terjadi dilingkungan Bani-bani ternyata mulai mengubah peta politik pemerintahan raja-raja. Daerah Timor adalah daerah pulau masing-masing pulau itu mempunyai riwayatnya sendiri-sendiri apalagi riwayat-riwayat itu tidak tertulis sehingga banyak keterangan

hanya berdasarkan cerita-cerita dari mulut ke mulut tetapi dapat dipercaya kebenarannya.

Sejarah pembentuk kefetoran Bani-bani hubungannya erat dengan para leluhur. Para amaf-amaf, amnasit-amnasit, bersama dengan rakyat mengadakan sidang untuk dibentuknya suatu kefetoran karena dilihat dari pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Ketentuan untuk menjadi seorang pemimpin adalah bertanggung jawab, mampu mengatur dan menciptakan kedamaian serta keseimbangan social. Para amaf-amaf dan amnasit-amnasit mempercayakan seorang pemimpin kepada laki-laki besar (Sulung) untuk menjadi fetor, karena menurut adat laki-laki besarlah yang pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Atas kesepakatan bersama Hendrikus Kun dipilih sebagai fetor di Bani-bani. Alasan para amaf, amnasit, dan masyarakat memilih Hendrikus Kun sebagai Fetor karena Hendrikus Kun memiliki pendidikan yang lebih tinggi, tegas, dapat mebaur dengan masyarakat, dan juga merupakan keturunan bangsawan.

Pada masa pemerintahan dikefetoran Bani-bani banyak tantangan yang dialami dengan masuknya dan berkembangnya pemerintahan Belanda ingin mempengaruhi masyarakat elit local. Kuatnya hubungan Belanda dengan masyarakat elit Lokal tertentu untuk memperlancar kepentingan belanda, para usif dan amaf diangkat menjadi raja oleh belanda, tetapi Karena kemampuan yang dimiliki oleh para pemimpin elit local maka kefetoran Bani-bani terbukti menjalani tugasnya dengan baik. Dalam pelaksanaan tugas fetor dibantu oleh para amaf, amnasit, tamukung, dan rakyat diwilayahnya.

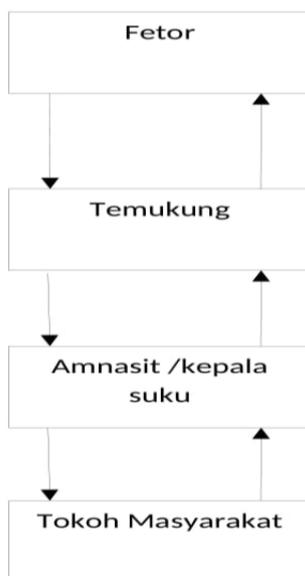
Pemerintahan kefetoran merupakan dasar pemikiranyang dijadikan sebagai panduan untuk melangsukan kegiatan-kegiatan pemerintah. Dasar pemerintahan yang dimiliki oleh suatu bidang pemerintahan kefetoran Bani-bani adalah system pemerintahan adat. Semua pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan dilakukan berdasarkan aturan-aturan adat yang berlaku. Fetor Hendrikus Kun bersama temukung-temukung dan tua-tua adat dalam melaksanakan pemerintahan adat dan kemasyarakatan secara turun temurun atau

genealogis. Lahirnya kefetoran Bani-bani tentunya dilator belakangi oleh beberapa hal antara lain:

- a. Adanya kesatuan masyarakat adat yang luas menghendaki adanya seorang pemimpin untuk mengatur dan menciptakan pendamaian, dan keseimbangan social.
- b. Masuk dan berkembangnya pemerintahan belanda yang ingin mempengaruhi para elit lokal dengan masyarakat untuk menerima dan melaksanakan pemerintahan belanda. Kuatnya hubungan belanda dengan para elit local tertentu untuk memperlancar kepentingan belanda, para usif diangkat menjadi raja.
- c. Jumlah keturunan dari masyarakat Bani-bani yang makin lama makin bertambah untuk mengakomodir berbagai kepentingan termasuk pemberian peran maka wilayah kerajaan perlu dibagi menjadi wilayah-wilayah kecil yang kemudian dikenal dengan sebutan kefetoran.
- d. Dari aspek pendekatan pelayanan publik (masyarakat) pada zaman tersebut dapat memungkinkan sebab dengan melihat luasnya wilayah kerajaan maka diperlukan para pembantu raja yaitu fetor yang cakap dan bertanggung jawab untuk mengatur wilayah dan masyarakat.

Kefetoran ini merupakan salah satu komponen yang tidak terlepas dari komponen yang lain. Oleh karena itu adanya kerjasama yang dilandasi oleh dasar kekeluargaan, maka kefetoran tersebut dapat tumbuh dan berkembang sampai berakhir masa kefetoran. Suatu system kefetoran juga dilandasi oleh struktur, dan perang yang dibebankan oleh komponen-komponen yang ada oleh karena itu guna menetapkan seorang untuk masuk dalam struktur kefetoran dibutuhkan kajian-kajian strategis, walaupun pikiran yang dikemukakan oleh penggagas pada saat itu masih terkola dengan cara berpikir tradisional terkesan masih sangat sederhana. Untuk lebih jelas tentang struktur pemerintahan kefetoran Bani-bani dapat dilihat pada struktur berikut:

Struktur Pemerintahan Kefetoran Bani-Bani Di Timor



Keterangan :  
 —————▶ Garis Komando  
 - - - - -▶ Garis Konsultasi

**Gambar 1.** Struktur Pemerintahan Kefetoran Bani-bani

Dengan melihat komponen yang tertulis pada struktur di atas maka tugas setiap komponen dan segala peranannya tidak sama. Ketiksamaan tugas ini dapat dimungkinkan oleh ikat adat yang sangat kuat pengaruhnya. Disini adat sebagai hukum tidak tertulis mempunyai peran sentral dalam upaya mengatur dan menata wilayah dan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian sistem pemerintahan atau tugas setiap komponen kefetoran Bani-bani dapat digambarkan sebagai berikut:

**1. Fetor**

Fetor adalah pemimpin tertinggi dalam suatu kampung yang berada dalam wilayah kerajaan. Fetor dipilih dan diangkat oleh raja. Ia sebagai penghubung antara rakyat dengan raja. Adapun Tugas-tugas fetor adalah:

- a. Melaksanakan perintah-perintah yang disampingkan oleh raja
- b. Menyelesaikan perselisihan,persengkatan yang timbul dalam wilayah dan dianggap

- c. perlu diteruskan masalah tersebut kepada raja
- d. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan raja.

**2. Temukung**

Temukung adalah pemimpin tertinggi dalam suatu kampung yang berada dalam wilayah kefetoran. Temukung dipilih dan diangkat oleh fetor. Ia sebagai penghubung antara rakyat dan fetor.

Tugas-Tugas Temukung adalah:

- a. Melaksanakan perintah-perintah yang disampaikan oleh fetor.
- b. Membantu fetor dalam menyelesaikan perselisihan,persengkataan,yang timbul dalam wilayah kefetoran.
- c. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan fetor .

**3. Amnasit**

Amnasit merupakan gabungan dari beberapa *uma* (rumah) sebagai pemimpin dalam wilayah, ini ditunjukan oleh anggota-anggota keluarga yang berada dalam kelompok ini. *Amnasit* bertugas sebagai pendukung fetor dalam menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan fungsi

pemerintahan diwilayahnya. Apabila terjadi perselisihan antara warga diwilayah maka Ia berhak menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan hukum adat.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang diulas tersebut maka dapat ditarik beberapa poin penting yang menjadi factor penentu terbentuknya Kefetoran Bani-Bani di Timor tahun 1936 diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan masyarakat adat yang luas menghendaki adanya seorang pemimpin untuk mengatur dan menciptakan pendamaian, dan keseimbangan social.
2. Masuk dan berkembangnya pemerintahan belanda yang ingin mempengaruhi para elit lokal dengan masyarakat untuk menerima dan melaksanakan pemerintahan belanda. Kuatnya hubungan Belanda dengan para elit local tertentu untuk memperlancar kepentingan belanda, para usif diangkat menjadi raja.
3. Jumlah keturunan dari masyarakat Bani-bani yang makin lama makin bertambah untuk mengakomodir berbagai kepentingan termasuk pemberian peran maka wilayah kerajaan perlu dibagi menjadi wilayah-wilayah kecil yang kemudian dikenal dengan sebutan kefetoran.
4. Dari aspek pendekatan pelayanan public pada zaman tersebut dapat memungkinkan sebab dengan melihat luasnya wilayah kerajaan maka diperlukan para pembantu raja yaitu fetor yang cakap dan bertanggung jawab untuk mengatur wilayah dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, R. (1963). *Penggunaan Ilmu Sejarah*. Djakarta: Prapantja.
- Bolis. (1992). *Ilmu Negara Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia.
- Doko, I.H. (1981). *Nusa Tenggara Timur dalam Kancah Kemerekaan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gazalba, Sidi. (1981). *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Aneka Pustaka.
- Kotten, B. K. (1972). *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Swapraja Larantuka*. Kupang: FKIP Undana.
- Parera, A.D.M. (1994). *Sejarah Pemerintahan Raja-Raja Timor*. Jakarta: Sinar Haraan
- Sitanggas, H. (1996). *Ekologi Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tambuka, R. (1999). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. (2002). *Pengantar Ilmu Sejarah (Teori Filsafat dan IPTEK)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widiyatmika, M. (2007). *Lintasan Sejarah Bumi Cencada*. Kupang: Pusat Pengembangan Madrasah NTT.
- Wouden, Van, F.A.E. (1996). *Klen Mitos dan Kekuasaan*. Jakarta: Grafi Pers.